

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

SYARIF HIDAYAT
2010/18504

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

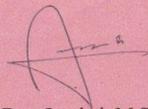
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul :Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota
Padang
Nama : Syarif Hidayat
NIM : 2010/18504
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2014

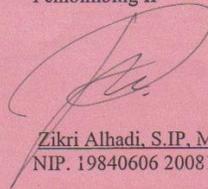
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Jumiati, M.Si
NIP. 19621109 198602 2 001

Pembimbing II



Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

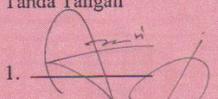
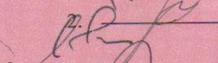
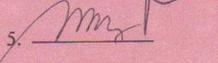
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu 23 Juli 2014 pukul 10.10 s/d 11.30 WIB

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang

Nama : Syarif Hidayat
NIM : 2010/18504
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

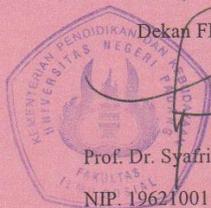
Padang, 23 Juli 2014

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dra. Jumiati, M.Si	1. 
Sekretaris : Zikri Alhadi, S.IP. MA	2. 
Anggota : Drs. Yasril Yunus, M.Si	3. 
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D	4. 
Anggota : Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D	5. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd

NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Syarif Hidayat: (2010/18504) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/ teknik *purposive* sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang sudah optimal. Pelaksanaan pemungutan tersebut meliputi penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang dan pembayaran atau penagihan pajak kepada wajib pajak. (2) Terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang yang meliputi dari unsur wajib pajak dan petugas pemungut pajak. (3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan meliputi memberi kemudahan dalam pembayaran kepada wajib pajak, melakukan pendataan ulang atau validasi data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan masih ada kendala-kendala yang meliputi dari unsur wajib pajak dan dari petugas pemungut pajak. Sehingga disarankan (1) Petugas pemungut pajak harus meningkatkan pelaksanaan, memberi tahu kepada masyarakat tentang fungsi pajak bumi dan bangunan disetiap pertemuan-pertemuan dan mempunyai target dalam pemungutan (2) Perlu tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang PBB. (3) Mengadakan diklat tentang pelaksanaan pemungutan PBB sebagai PAD, bagi setiap pegawai yang berada pada naungan DPKA Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Jumiati, M.Si. sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Zikri Alhadi, S.IP. MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kepala dan Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Masyarakat yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa buat orang tuaku Bapak Ardinis dan Ibu Efriati serta adik-adikku Syaiful Hidayat dan Rahma Indriani yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Teori.....	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Syarat Pemungutan pajak.....	10
d. Teori Pemungutan Pajak.....	11
e. Asas Pemungutan Pajak.....	12
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
g. Hambatan dan Upaya Dalam Pemungutan Pajak.....	16
2. Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	19

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
d. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
e. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bagunan.....	24
g. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
h. Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan.....	33
3. Penelitian Terdahulu.....	35
B. Kerangka Konseptual.....	41

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Jenis, Sumber, Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	45
E. Uji Keabsahan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	50
1. Gambaran Umum Kota Padang.....	50
2. Kondisi Geografis Kota Padang.....	50
3. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.....	51
a. Pembentukan dan kedudukan.....	51
b. Visi dan Misi.....	52
c. Struktur Organisasi.....	53
d. Tugas Pokok dan Fungsi.....	56

B. Temuan Khusus.....	57
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang....	57
2. Kendala – Kendala Yang Ditemukan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang.....	72
3. Upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang.....	78
C. Pembahasan.....	87
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang....	88
2. Kendala – Kendala Yang Ditemukan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset di Kota Padang.....	93
3. Upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang.....	95
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
 DAFTAR PUSTAKA.....	102
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengelompokan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.....	02
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4,5 Kota Padang Tahun 2011-2013.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi DPKA Kota Padang	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.....	108
Lampiran 3	Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.....	109
Lampiran 4	Realisasi Penerimaan PBB Per- Kecamatan Se- Kota Padang Tahun 2010 sampai Tahun 2011.....	110
Lampiran 5	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Padang Bulan Desember 2012.....	111
Lampiran 6	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Padang Tahun 2013.....	112
Lampiran 7	Foto – foto Pelaksanaan Wawancara dengan Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang penting artinya bagi penerimaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola secara baik dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi bagi pendapatan negara adalah Pajak Bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan bangunan dengan diperkuat UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Hal ini diberlakukan karena daerah-lah yang lebih mengetahui tentang penataan pemukiman yang ada di setiap wilayah, serta adanya pemetaan yang lebih spesifik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dengan adanya biaya tersebut, maka dapat menjadi PAD yang dapat digunakan Pemerintah Daerah itu sendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta menjaga kestabilan dalam penyusunan APBD.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang untuk memungut, mengawasi serta memeriksa pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang berasal dari pajak.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Di dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Berikut ini adalah Pengelompokan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak di Kota Padang :

Tabel 1.1
Pengelompokan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak

No	Pengelompokan PBB	Jumlah/Tarif yang di bayar (Rp)	Pelaksanaan Pemungutan
1.	Buku I	≤ 100	Kolektor Kelurahan
2.	Buku II	100 – 500	Kolektor Kelurahan
3.	Buku III	500 – 2 Juta	Kolektor Kelurahan
4	Buku IV	2 Juta – 5 Juta	Petugas DPKA
5.	Buku V	≥ 5 Juta	Petugas DPKA

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengelompokan pajak bumi dan bangunan dibagi menjadi lima kelompok. Pengelompokan Pajak Bumi dan bangunan ini dikelompokkan berdasarkan jumlah/tarif pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak. Tarif pajak yang nilainya \leq Rp. 100.000,- dikelompokkan

pada buku I (satu) yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Kolektor atau Petugas kelurahan, tarif pajak yang nilainya Rp. 100.000 – Rp. 500.000 dikelompokkan pada buku II (dua) pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Kolektor atau Petugas kelurahan, tarif pajak yang nilainya Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000 dikelompokkan pada buku III (tiga) pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Kolektor atau Petugas kelurahan, tarif pajak yang nilainya Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 dikelompokkan pada buku IV (empat) pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Petugas pemungut DPKA, dan tarif pajak yang nilainya \geq Rp. 5.000.000 dikelompokkan pada buku V (lima) pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Petugas pemungut DPKA. Pengelompokan pajak bumi dan bangunan ini bertujuan untuk mempermudah petugas pemungut pajak dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kota Padang dikatakan berjalan dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pajak bumi dan bangunan tersebut masih ada masalah-masalah yang timbul sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Hal ini bisa di lihat pada Surat Tanda Terima Pajak Sementara (STTPS) yang ada di Kota Padang yang masih banyak masyarakat belum membayar pajak bumi dan bangunan. Kebanyakan masyarakat di Kota Padang membayar Pajak Bumi dan Bangunan apabila ada keperluan atau kepentingan. Selain itu masalah dalam pemungutan pajak

bumi dan bangunan di Kota Padang yaitu terjadinya ketidaksesuaian ketetapan pajak dengan ukuran tanah yang dikeluhkan oleh subjek pajak seperti Bapak Johan Tanama yang tanah dan bangunannya kecil tapi di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tercatat besar bumi dan bangunannya yang tidak sesuai dengan aslinya sehingga Bapak Zulfikar membayar mahal untuk Pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga ada Ibu Desmawati yang besar bumi dan bangunannya tapi dia membayar kecil di SPPT karena tidak cocoknya luas di SPPT dengan keadaan yang aslinya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Al Anshar sebagai Kasi Penagihan di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset pada hari selasa tanggal 12 Maret 2014 menyatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan pemungutan di kota Padang sudah berjalan dengan baik namun masih ada masalah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang yaitu terjadinya ketidaksesuain ketetapan pajak dengan ukuran tanah yang ada di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pada saat wawancara hari selasa tanggal 12 Maret 2014 dengan salah satu staf Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Padang yaitu Bapak Nasrul S.Sos juga memberi tahu bahwa masalah-masalah yang timbul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Padang yaitu adanya pajak bumi dan bangunan yang ganda maksudnya subjek pajak mendapatkan dua atau lebih pajak bumi dan bangunan yang dikenakan kepada wajib pajak yang mana wajib pajak tersebut mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang ganda atau lebih.

Pada hari yang sama penulis juga mewawancarai salah satu staf Dinas Pendapatan yaitu Bapak Feri Ferdian S.Sos juga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan terdapat masalah-masalah yang membuat pelaksanaan pemungutan tersebut terganggu salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat masih kurang pengetahuannya terhadap pajak bumi dan bangunan sehingga masyarakat tidak mengetahui apa gunanya dari pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kota Padang. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Padang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini. Masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) terjadinya ketidak sesuai ketetapan pajak dengan ukuran tanah yang dikeluhkan oleh salah satu subjek pajak.
3. Ada objek pajak tetapi subjek pajak tidak diketahui.

4. Adanya pajak bumi dan bangunan yang ganda maksudnya objek pajak mendapatkan dua pajak bumi dan bangunan yang dikenakan kepadanya.
5. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah tentang pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penulis dalam penelitian dan agar penelitian tidak melebar jauh dari pokok penelitian, maka penelitian ini penulis batasi pada **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Padang”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Padang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan di teliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) di Kota Padang.
3. Mendeskripsikan upaya dari pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota padang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dapat bermanfaat bagi penulis untuk menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti serta dapat menunjang perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan perkembangan mata kuliah administrasi perpajakan pada khususnya.

2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan kontribusi dan bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil keputusan dan penyelenggaraan pemerintah dalam memecahkan masalah serupa, serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.